ABSTRAK

Nama : Eko Prianif
NPM : 01659210065
Judul : Pengawasan Atas Tindakan Administrasi Dalam Pemberian Izin Tinggal Kunjungan WNA Terhadap PNBP Di Bidang Keimigrasian (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur)

Sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunnan dalam mencapai cita-cita perjuangan bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus di optimalkan dalam pengelolaanya. Karena jika pengelolaan PNBP masih kurang dioptimalkan maka kontribusinya terhadap anggaran negara kurang maksimal. PNBP merupakan salah satu unsur penerimaan negara yang masuk didalam struktur APBN. PNBP timbul karena adanya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam pengaturan, pelayanan, perlindungan masyarakat serta pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Imigrasi adalah suatu Lembaga Negara yang sangat vital bagi lalu lintas perpindahan penduduk antar negara, apalagi di era perdagangan bebas saat ini banyak orang ingin mengembangkan bisnis di Indonesia. Mereka menganggap Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya dan masih banyak peluang untuk mengeksplorasi kekayaan Indonesia menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan. Keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum di suatu negara di dalam wilayah territorial negara yang bersangkutan, keberadaan peraturan keimigrasian tentu tidak lepas dari pelaksanaan fungsi keimigrasian itu sendiri harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan nasional yang secara selektif menentukan warga negara asing yang boleh masuk atau keluar dari wilayah indonesia dan sanksi hukum apa saja yang harus dikenakan terhadap warga negara asing tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan salah satu ujung tombak dalam meningkatkan penghasilan Negara dari PNBP melalui pelayanan Warga Negara Asing (WNA) melalui pemberian Izin Keimigrasian. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian Izin Tinggal di Indonesia masih terdapat banyak penyalahgunaan. Harus bisa dipastikan bahwa kegiatan WNA sudah sesuai dengan izin tinggal yang di berikan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

ABSTRACT

Name : Eko Prianif
Student ID : 01659210065
Title : *Supervision On Administrative Sanctions In Issuing Visitor Permit To Foreign Nationals In The Context Of The Non-Tax Revenue In Immigration (Case Study: East Jakarta Immigration Office)*

As one of financial sources of national development in achieving the goals of the nation towards a just and prosperous society, the management of Non-Tax Revenue (PNBP) must be optimized. If the management of PNBP is not optimal, the contribution to the national budget will also not be optimal. PNBP is one element of national revenue that is included in the APBN structure. PNBP is designed in the context of the implementation of government duties and functions in regulation, service, public protection, and management of national assets including the use of natural resources. Immigration is a State Institution that is very vital for the movement of people between countries, especially in the current era of free trade, many people want to develop business in Indonesia. They think Indonesia is a country rich in resources and there are still many opportunities to explore Indonesia's wealth into a promising business. The existence of immigration regulations is a very important attribute in upholding the rule of law in a country within the territorial territory of the country concerned, the existence of immigration regulations is certainly inseparable from the implementation of the immigration function itself which must be carried out in accordance with applicable laws and regulations. A national policy that selectively determines which foreign nationals may enter or leave Indonesian territory and what legal sanctions must be imposed on these foreign nationals. The method used in this paper is empirical juridical. The Directorate General of Immigration is one of the frontlines in increasing the national revenue from PNBP through Foreign Citizens (WNA) by issuing the Immigration Residence Permits. It is inevitable that the misuse of Residence Permit in Indonesia still occurs. Referring to this situation, it should be overcome by carrying out immigration operations on the activities of foreigners in Indonesia. It must be ensured that foreigners who stay in Indonesia must obey their residence permits conditions.

Keywords: Law Enforcement, Non-Tax State Revenue (PNBP)